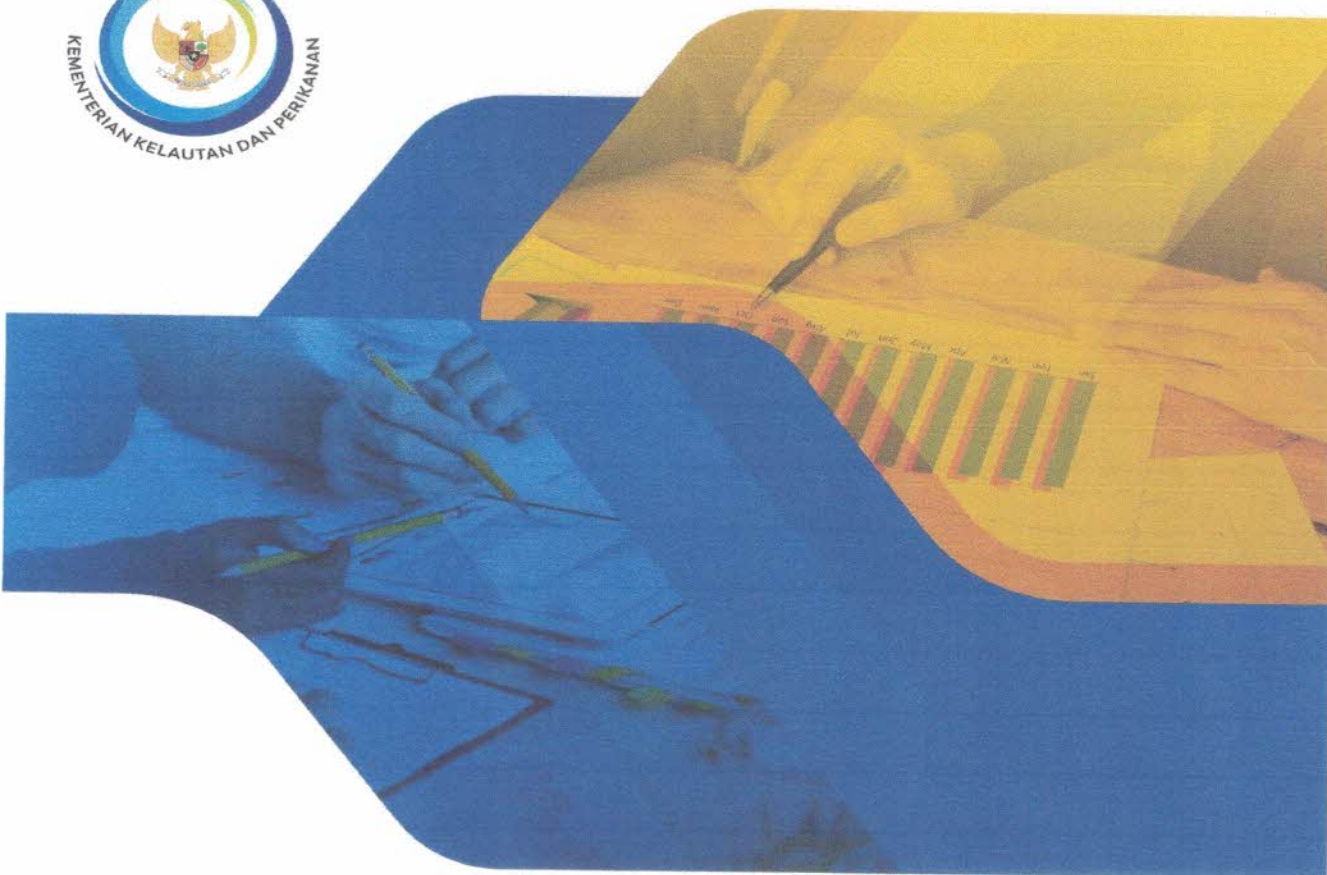


# RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024



## RENCANA KINERJA TAHUNAN BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2024

---

#2024  
KKP BEYOND

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan acuan yang terdapat di dalam Rencana Strategis Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar Tahun 2020-2024. Pengelolaan manajemen kinerja di Balai Besar KIPM Makassar dilaksanakan dari tingkat organisasi sampai dengan individu, dengan pendekatan *balanced scorecard* (BSC)

Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai lingkup Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar atas waktu, tenaga dan pemikiran yang diberikan dalam rangka penyusunan Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2024 ini.

Kami menyadari bahwa Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar Tahun Anggaran 2024 ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun diharapkan dapat memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.



Makassar, 12 Januari 2024  
Plt. Kepala Balai Besar KIPM Makassar

Mohammad Zamrud

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Tugas dan Peran Organisasi .....	2
1. Tugas dan Fungsi.....	2
2. Struktur Organisasi .....	7
B. Keterkaitan RKT dengan Renstra .....	9
BAB II RENCANA KERJA TAHUNAN.....	12
A. Tujuan Strategis .....	12
1. Visi .....	12
2. Misi .....	13
3. Tujuan Strategis .....	15
B. Sasaran, Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target .....	16
BAB III PENUTUP .....	21



## **BAB I PENDAHULUAN**

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis, yaitu berupa serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang akan dilakukan setiap tahun dalam rangka mencapai sasaran, tujuan, visi pemerintah. Dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan tetap mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar Tahun 2020-2024. Beberapa manfaat yang dapat diidentifikasi dengan menyusun Rencana Kinerja Tahunan adalah sebagai berikut ;

1. Kegiatan yang akan dilakukan akan berhasil bila direncanakan dengan baik dan matang;
2. Rencana Kinerja Tahunan merupakan dasar untuk penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian dan Lembaga ;
3. Rencana Kinerja Tahunan dapat dijadikan acuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan;
4. Rencana Kinerja Tahunan dapat dijadikan pembanding dalam Laporan Kinerja.



## **A. Tugas dan Peran Organisasi**


### **1. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2023 Tahun 2023 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasann Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. (BPPMHKP) mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:


- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana



Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai Besar KIPM Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta penerapan sistem manajemen mutu,. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Besar KIPM Makassar menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pelayanan operasional bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan;
- b. pengelolaan sistem manajemen mutu laboratorium dan lembaga inspeksi di bidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan sistem ketertelusuran di bidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh, dan penerbitan sertifikat, serta survailen pada

- 
- sertifikasi mutu produksi sumber daya kelautan, penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan;
- e. pelaksanaan inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh, dan penerbitan sertifikat, serta survailen pada sertifikasi mutu penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan;
  - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Arah kebijakan dan strategi memuat langkah-langkah yang berupa program-program indikatif untuk menyelesaikan masalah yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Program-program tersebut mencakup kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN yang sesuai dengan bidang pengawasan dan pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi BPPMHKP. Oleh karena itu arah kebijakan dan strategi BPPMHKP dalam rangka mendukung perwujudan arah RPJMN 2020-2024, visi misi Presiden, serta implementasi Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2020-2024 sebagai berikut:



1) Pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan.


Pengelolaan sumberdaya terbarukan tersebut harus dilakukan dengan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah pengawasan dan pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengendalian dan pengawasan mutu yang dilaksanakan melalui strategi:

- a. Penerapan parameter pengujian yang terakreditasi di laboratorium sektor kelautan perikanan
- b. Penerapan standar sistem pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan
- c. Penerapan sistem manajemen mutu Laboratorium
- d. Peningkatan pemahaman terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan
- e. Penerapan quality assurance sesuai yang sesuai standar, sistem dan regulasi pada proses produksi perikanan

2) Peningkatan daya saing dan nilai tambah produk perikanan sebagai upaya untuk pemantapan sistem jaminan mutu dan keamanan (*quality and safety assurance*) hasil perikanan melalui strategi

- a. Pengembangan sistem pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar melalui:



- 
- Sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan
  - Registrasi Unit Pengolahan Ikan di negara mitra
  - Penerepan sistem *traceability* rantai pasok bahan baku pada Unit Pengolahan Ikan (UPI)
- b. Harmonisasi sistem penjaminan mutu yang implementatif
- Harmonisasi sistem, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara mitra (MoU/MRA) serta negara tujuan ekspor lainnya
  - Penyelesaian penanganan kasus ekspor hasil perikanan
- 3) Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola, akan dilaksanakan melalui strategi :
- a. Pengelolaan sumber daya manusia berbasis kompetensi (*Competency Based Human Resource Management*);
  - b. Perbaikan pelayanan publik melalui penerapan Standar Pelayanan;
  - c. Peningkatan kemudahan akses dan transparansi informasi publik;
  - d. Penerapan manajemen berbasis kinerja dan efektivitas pengelolaan anggaran.




## 2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Struktur Organisasi Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar terdiri atas :

### a. Kepala Balai Besar

- 1) Setiap unsur di lingkup Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dalam melaksanakan tugas harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan maupun dalam hubungan antar instansi baik pusat maupun daerah.
- 2) Setiap pimpinan pada unit organisasi Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- 3) Setiap pimpinan pada unit organisasi Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan



bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan

- 4) Setiap pimpinan pada unit organisasi Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Setiap pimpinan pada unit organisasi Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan langsung dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

b. Kepala Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.




c. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- 2) Dalam pelaksanaan tugas ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.
- 3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**B. Keterkaitan Rencana Kinerja Tahunan dengan Renstra**


Rencana Strategis Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar bukan merupakan pedoman



yang statis tetapi dinamis, artinya dapat ditinjau ulang secara periodik, setiap setahun sekali. Peninjauan rencana juga dapat dilakukan sesuai dengan perubahan-perubahan penting yang diperkirakan berpengaruh secara signifikan terhadap penyelenggaraan dan pengembangan organisasi.

Namun demikian, Rencana Strategis ini tidak hanya sekedar sebuah dokumen untuk memenuhi kepentingan formal administratif, Rencana Strategis disusun berdasarkan kesadaran, kehendak, kebutuhan bersama untuk dijadikan sebuah pedoman bagi penyelenggaraan dan pengembangan karantina ikan, agar setiap keputusan yang diambil dan setiap langkah yang ditempuh oleh setiap elemen pada setiap level merupakan bagian dari upaya untuk menuju tujuan bersama yang sudah ditetapkan. Rencana Strategis ini harus menjadi komitmen bersama seluruh elemen dan sebagai pedoman penyelenggaraan dan pengembangan karantina ikan, khususnya di Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar. Selanjutnya Rencana Strategis ini perlu dijabarkan dalam berbagai dokumen perencanaan yang lebih operasional dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Pengelolaan kegiatan berbasis kinerja diharapkan dapat mengantisipasi fungsi dan peranan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang semakin meningkat dengan konsekwensi tanggung jawab yang semakin berat, akibat dari



perubahan global sistem perdagangan, khususnya komoditi perikanan antar negara. Namun demikian melalui perencanaan yang baik dalam Rencana Strategis 2020-2024 Lingkup Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar, yang dirinci lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan, diharapkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diselaraskan dengan misi, kebijakan, program dan kegiatan dalam mencapai visi, sasaran dan tujuan organisasi khususnya di Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar dapat berhasil dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip sistem pemerintahan yang baik.



## BAB II RENCANA KERJA TAHUNAN


### A. Tujuan Strategis

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Balai Besar KIPM Makassar telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu 2020 - 2024 dengan selalu memperhitungkan perubahan lingkungan. Rencana strategis ini memberikan arah dan sasaran yang jelas dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.

Balai Besar KIPM Makassar sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPMHKP mempunyai tanggung jawab dalam mendukung mewujudkan visi dan misi pemerintah. Selaras dengan visi dan misi pemerintah serta sesuai dengan tugas, fungsi dan peran Balai Besar KIPM Makassar dalam mendukung pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Maka visi dan misi Presiden Joko Widodo adalah sebagai berikut :

#### **Visi**

Sebagaimana diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna pertama, maka kementerian dalam kabinet kerja periode tahu 2020 – 2024 tidak perlu merumuskan visi masing-



masing kementerian. Semua kementerian adalah unit-unit kerja yang berkewajiban mendukung visi Presiden Joko Widodo, yakni "terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong".


Dalam kaitannya dengan mandat organisasi yang diemban oleh BPPMHKP (Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan), maka aspek yang berkaitan dengan visi Presiden di atas adalah dukungan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam memastikan produk perikanan yang berkualitas

### **Misi**

Untuk mewujudkan visi di atas, ada sejumlah 7 misi yang menjadi sasaran pemerintahan Presiden Joko Widodo, yakni:


1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan Negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim.



- 
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
  5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.
  6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
  7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Balai Besar KIPM Makassar dalam mendukung BPPMHKP (Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan), maka beberapa misi tersebut dapat diadopsi menjadi misi BPPMHKP (Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan), yakni:

1. Mewujudkan keamanan nasional dengan mengamankan sumber daya maritim melalui penjaminan mutu produk perikanan nasional.
2. Memperkuat jati diri sebagai negara maritim, khususnya dalam hal perdagangan internasional untuk komoditas perikanan.
3. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera, melalui pengembangan pola konsumsi ikan yang



bermutu serta budidaya ikan yang sesuai standard, sistem dan regulasi

4. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing dalam pemasaran produk perikanan melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan.
5. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional di bidang karantina ikan dan pengendalian mutu produk perikanan

### **Tujuan Strategis**

Tujuan pembangunan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden. Keberadaan Balai Besar KIPM Makassar dalam mendukung BPPMHKP adalah menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan nasional dengan sasaran

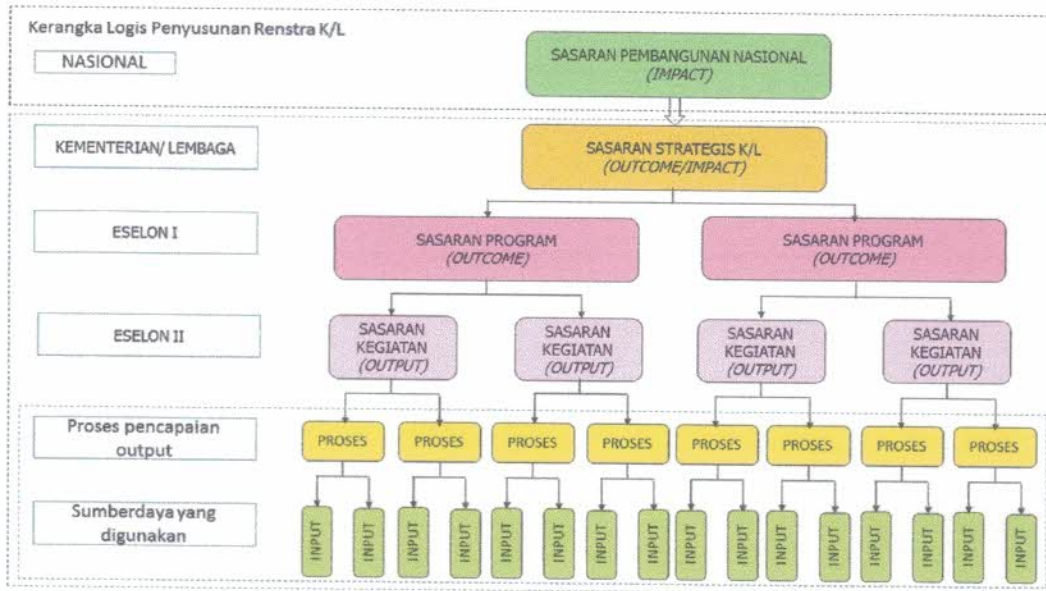
- Menurunnya jumlah kasus penolakan/ penahanan ekspor hasil perikanan per negara mitra,
- Meningkatnya Unit Pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan ekspor serta

- 
- Meningkatnya rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan

Meningkatnya unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan system ketertelusuran/ traceability Meningkatkan ruang lingkup unit pengolahan ikan yan bersertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). Meningkatnya lokasi usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi

### **B. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target**


Sasaran strategis adalah kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh BPPMHKP yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) satu atau beberapa program/ kegiatan. Dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga, menempatkan sasaran strategis berada pada level Kementerian/ Lembaga.



Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024 sebagai penjabaran Visi Misi pembangunan nasional dan Balai Besar KIPM Makassar ditetapkan melalui tahapan-tahapan berdasarkan tujuan yang akan dicapai serta isu strategis prioritas agenda prioritas nasional, yang dibagi dalam empat perspektif.

#### PERSPEKTIF

<i>Stakeholder Perspective</i>	Kontribusi lembaga bagi pemenuhan kebutuhan dan ekspektasi stakeholder
<i>Customers Perspective</i>	Bagaimana memenuhi kebutuhan pelanggan organisasi
<i>Internal Process Perspective</i>	Proses kerja kunci yang harus dilakukan untuk meningkatkan kontribusi lembaga
<i>Learn &amp; Growth Perspective</i>	Bagaimana mutu SDM organisasi, IT dan anggaran dikembangkan



Berdasarkan pedoman penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga serta empat perspektif di atas, maka sasaran strategis terkait fungsi pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang berada pada level Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar, Rencana Kinerja Tahun 2024, yang disusun dengan pendekatan *balance scorecard*, merupakan penjabaran lebih lanjut Rencana Strategis Balai Besar KIPM Makassar 2020-2024 yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.

Pada tingkat Balai Besar KIPM Makassar, diimplementasikan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), Target dan Peta Strategi (*strategy map*) Balai Besar KIPM Makassar Tahun 2024. Selanjutnya, secara berjenjang target kinerja Balai Besar KIPM Makassar tersebut diturunkan (*cascading process*) sampai dengan tingkat individu. Rencana Kinerja Tahun 2024 Balai Besar KIPM Makassar yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya, serta peta strategi Balai Besar KIPM Makassar tahun 2024 telah dirinci ke dalam masing-masing perspektif sebagai tabel di bawah ini.

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Balai Besar KIPM Makassar  
Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
<b>Kegiatan 1. Pengendalian Mutu</b>				
SK 1.	Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional Dan Partisipatif	1	Rasio Eksport ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan (%)	99
		2	Penjaminan Mutu hasil perikanan di wilayah RI (lokasi)	4
		3	Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)	60
		4	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI (produk)	345
<b>Kegiatan 2. Standarisasi Sistem dan Kepatuhan</b>				
SK.2.	Terselenggaranya Pengendalian Dan Pengawasan Sistem Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Professional Dan Partisipatif	5	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Balai Besar KIPM Makassar (indeks)	84
		6	Unit kerja yang menerapkan sistem pengendalian (Official control) lingkup Otoritas Kompeten (Unit)	1
		7	Lokasi usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	18

Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan				
	Tatakelola pemerintah yang baik lingkup BPPMHKP	8	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai Besar KIPM Makassar (Indeks)	84
		9	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	82
		10	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)	100
		11	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)	80
		12	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	93,76
		13	Nilai kinerja anggaran lingkup Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	86
		14	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)	80
		15	Tingkat kepatuhan BMN lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)	80

### **BAB III PENUTUP**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) di Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar. Dengan demikian diharapkan terdapat keselarasan antara Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan kegiatan yang tercantum di dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), serta adanya keterkaitan dengan Laporan Kinerja (LKJ).

Dengan tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini diharapkan antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan terdapat keselarasan dan pencapaian hasil kegiatan di Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar dapat terlaksana dengan baik.



